

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk 273,8 juta orang. Indonesia memiliki potensi tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Bencana alam sering terjadi di Indonesia salah satunya banjir, yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat dan hujan dengan intensitas yang tinggi. Indonesia berada di daerah yang beriklim tropis mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bencana banjir seringkali terjadi pada musim penghujan di Indonesia, dikarenakan intensitas hujan di setiap daerah berbeda-beda. Negara Indonesia juga banyak dengan bencana banjir hampir setiap wilayah dapat atau seringkali terendam oleh banjir setiap tahunnya pasti terjadi terutama yang di beberapa kota yang tingkat potensi bencana yang tinggi. Ada juga yang disebabkan oleh faktor sampah dengan menyumbat aliran air dan akan menyebabkan genangan yang cukup besar. Pada tahun 2022 Indonesia Mengalami peningkatan curah hujan, kejadian ini berhubungan dengan siklon tropis sehingga meningkatnya hujan hingga 340 mm/hari dalam curah hujan besar biasanya turun dalam bulan (Noe, 2022).

Indonesia disisi lain menghasilkan sampah dengan jumlah sebanyak 70 juta Ton di tahun 2022 menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang

di tahun sebelumnya mencapai 68,5 juta ton di tahun 2021. Masyarakat sangatlah penting dalam mengambil peran dalam pengelolaan sampah karena, sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu harus dengan pengelolaan dengan baik agar tidak menyebabkan banjir, dengan jumlah sampah yang besar akan menyumbat drainase dan akan mengakibatkan banjir. Masyarakat harus bisa menjaga lingkungan dan bisa juga mengolah sampah yang menjadi bermanfaat, masyarakat juga harus menerapkan 4R yaitu *reduce, reuse, recycle, replace*, beserta memisahkan sampah anorganik dan non organik(IV, 2022).

Bencana banjir di suatu daerah tentunya dibutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana banjir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam ini Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah, adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah atas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan dalam prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2)).

Banjir juga bisa juga diakibatkan dengan hujan intensitas tinggi dengan meluapnya drainase karena tidak bisa menampung debit air dengan skala besar, banjir juga hal yang sangat merugikan karena mengancam kehidupan manusia.

Banjir dan genangan air memiliki perbedaan yaitu perbedaan pada ketinggian permukaan air, secara normal genangan air hanya memiliki tinggi kurang dari 40 cm kecuali jika ada hal-hal yang mempengaruhinya dan banjir memiliki ketinggian lebih dari 40 cm<sup>1</sup>. Pada dasarnya banjir juga bisa terjadi disebabkan oleh faktor manusia yang dapat membuat perubahan alam dan tata ruang. Permasalahan ini juga tidak hanya oleh pemerintah saja akan tetapi dari masyarakat itu sendiri, pada bencana banjir pemerintah juga tidak dapat menduga pengeluarannya karena untuk sarana atau fasilitas umum yang rusak karena oleh bencana banjir tersebut.

Jawa Barat adalah sebuah Provinsi yang berada di Pulau Jawa Provinsi ini memiliki luas sekitar 36.054 kilometer persegi dan merupakan Provinsi terpadat dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa. Jawa Barat yang beriklim tropis, dengan suhu terendah mencapai 9 °C yang berada di Puncak Gunung Parago dan suhu yang tertinggi tercatat mencapai 34 °C di Pantai Utara. Pada curah hujan rata-rata mencapai pada 2.000 mm per tahun di seluruh Provinsi Indonesia. (Pambudi, 2022)

Data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistika mengatakan bahwa kasus banjir di Indonesia pada tahun 2021 tercatat ada 7.040. Jawa Barat terdapat angka kasus banjir tercatat dengan jumlah 1.193 kasus. Di tahun 2021 kota Tasikmalaya mengalami 2 kejadian. Hal tersebut Melalui hasil pra-penelitian dengan Bapak Dadang Mohamad Romdon., S.T. (Rabu, 17/05/2023) beliau selalu fungsional analisis kebencanaan ahli muda bahwa Kota Tasikmalaya cukup pada

---

<sup>1</sup>Taufan EKA Pramudita, Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan Air di Kota Malang, (Studi Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang), 2022, halaman 1.

penduduk oleh karena itu semakin banyak tanah di tutup oleh bangunan maka potensi banjir itu akan sangat besar karena curah hujan di Kota Tasikmalaya itu 500 mm/detik jadi tanah itu harus bisa menyerap curah hujan. Maka dari itu harus ada penataan suatu bangunan atau infrastruktur yang benar agar tidak terjadi luapan air yang besar sehingga tidak mengakibatkan banjir.

Kota Tasikmalaya pada saat musim penghujan seringkali terjadi bencana banjir dikarenakan adanya beberapa faktor. Banjir merupakan suatu kejadian dimana terendamnya suatu daerah atau daratan disebabkan volume air yang meningkat. Dalam undang-undang no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pada pasal 1 ayat juga dijelaskan juga definisi banjir<sup>2</sup>. Ada beberapa penyebab banjir bisa terjadi, diantaranya (Aliyu, 2023):

- A. Faktor manusia, penggunaan daratan sebagai pemukiman dan industri, eksploitasi hutan yang sehingga resapan pada tanah berkurang. Pengikisan tanah yang disebabkan sedimentasi di sungai yang memperlambat jalannya air. Membuat tempat tinggal di atas saluran air, yang kemudian pembangunan saluran air tidak maksimal dalam perencanaannya dan ketidaksadaran masyarakat untuk membuang sampah sembarangan ke daerah sungai atau saluran.
- B. Faktor alam yang bersifat statis (tetap), situasi geografis yang ada pada suatu wilayah yang seringkali terkena badai atau siklon dan kondisi

---

<sup>2</sup>peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

topografi dimana daratan berbentuk cekungan sehingga membuat alur sungai dan kemiringannya tidak sempurna atau bisa dikatakan datar.

- C. Faktor alam yang bersifat dinamis (berubah), curah hujan yang intensitasnya tinggi, pembendungan atau arus balik yang terjadi di sungai, menurunnya permukaan atau amblesan, dasar sungai dangkal karena sedimentasi tinggi.

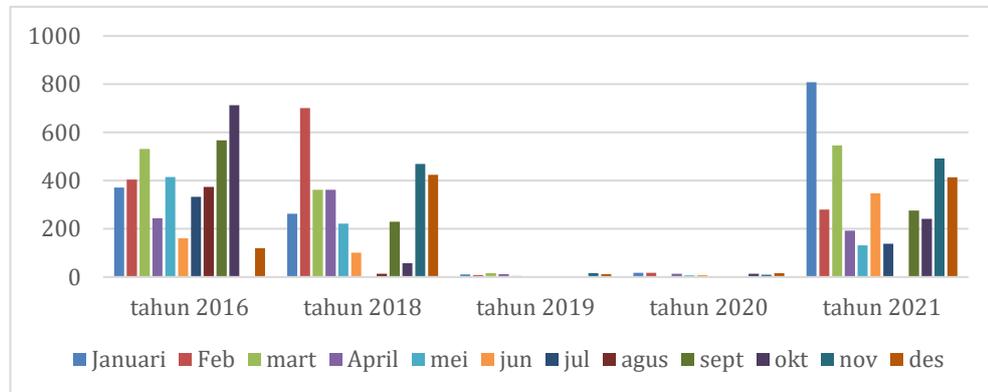
Di Kota Tasikmalaya sendiri curah hujan tinggi juga menjadi penyebab banjir yang terjadi di beberapa daerah. Adapun bencana banjir tersebut terjadi disebabkan oleh meluapnya sungai di Kota Tasikmalaya, salah satunya adalah Sungai Ciwulan yang terletak di Kecamatan Kawalu. Adapun data yang diperoleh penulis mengenai data curah hujan Kota Tasikmalaya dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya pada tabel 1.1. Kondisional penyebab lain bencana banjir yang terjadi di Kota Tasikmalaya yaitu kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke sungai atau ke selokan yang ada di sekitar pemukiman warga sesuai.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Timbulan Sampah Kecamatan (Ton/hari)**

<b>Kecamatan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kawalu	42.65	43.63	43.98
Tamansari	33.43	34.93	35.28
Cibeureum	30.19	30.89	31.17
Purbaratu	19.82	19.99	20.12
Tawang	28.21	27.81	28.01
Cihideung	32.28	32.11	32.2
Mangkubumi	42.61	43.46	43.73
Indihiang	25.44	25.96	26.17
Bungursari	25.99	26.87	27.22
Cipedes	36.13	36.27	36.51

*Sumber: Open data Tasikmalaya*

**Gambar 1.1**  
**Curah Hujan (mm) di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.

Pada umumnya, curah hujan tinggi akan menyebabkan banjir. Hal ini seiringan dengan minimnya lahan penyerapan air di Kota Tasikmalaya yang dikarenakan banyaknya perumahan yang baru dibangun sebagai bentuk pengalih fungsian dari tempat yang tadinya dibuat untuk kolam atau sawah. Pada tahun 2022, telah terjadi tiga belas peristiwa banjir di Kota Tasikmalaya yang menyebabkan 1.016 rumah terdampak. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya terjadi enam kali bencana banjir di Kota Tasikmalaya.<sup>3</sup>

Dilansir dari Detik Jabar banjir menyebabkan kerugian secara materil yang mana salah satunya terdapat masyarakat yang menyebutkan mengalami kerugian karena banjir menyebabkan lahan pertanian seluas 1 hektar rusak parah di kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, kerugian dicapai hampir lebih dari 50 juta, di area tersebut total ada 2 hektar yang terdampak dan yang rusak parah ada sekitar 500 bata. Bukan hanya lahan pertanian saja di Kelurahan Panyingkiran

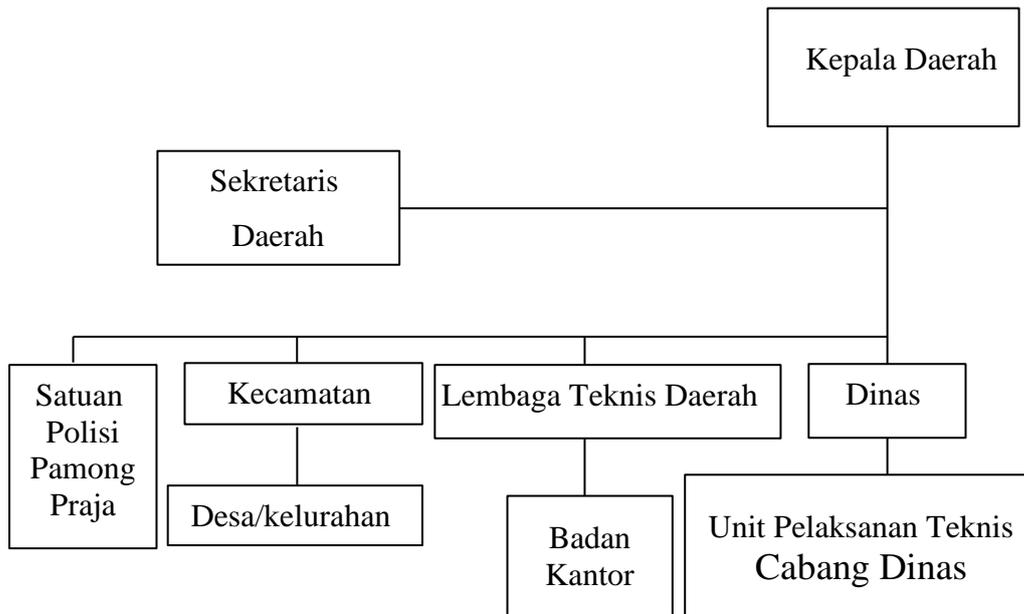
<sup>3</sup> P, Adjie. P. (2022). Bencana Banjir Meningkat di Kota Tasikmalaya Sepanjang Tahun 2022. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rmrst4396/bencana-banjir-di-kota-tasikmalaya-meningkat-pesat-sepanjang-2022>, diakses pada 30 Oktober 2023.

Kecamatan Indihiang banjir juga merusak fasilitas publik seperti di bantaran sungai Ciloseh. Taman Cipanyir yang dibangun oleh kementerian PUPR itu mengalami longsor sekitar 10 meter (Amiruddin,2022).

Hasil wawancara dengan bapak Dadang Mohammad Romdon, S.T. dari BPBD kota Tasikmalaya, kesulitan dalam menangani banjir pada suatu titik lokasi yaitu koordinasi dengan kelurahan ataupun RT dan RW setempat yang terdampak banjir, dan juga suatu kewenangan yang membuat dinas BPBD tidak dapat berbuat banyak pada bencana banjir di suatu titik karena ada batasan suatu kewenangannya, ada juga anggaran yang terbatas. Menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 pasal 61 pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam konsep *governance* pemerintah hadir bukan hanya sebatas jabatan atau kekuasaan struktural saja, tetapi bagaimana bisa bekerjasama dengan melakukan hubungan *non-pemerintah* seperti *stakeholder* atau masyarakat. Mereka semua bersatu dalam konsep pemerintahan dimana tugas dan tupoksi direalisasikan secara bersama-sama demi suatu tujuan. Adapun struktur organisasi perangkat daerah pada gambar 1.2.

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Perangkat Daerah**



*Sumber :Thoha, 2014*

Dalam kelembagaan Pemerintah Daerah yang berlandaskan dalam undang-undang yang mengatur peraturan pada pemerintah daerah yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Dalam penjelasan struktur diatas sekretariat daerah sebagai pemimpin dalam pembinaan dan pelayanan administrasi juga berperan sebagai mengoordinasikan unit-unit perangkat daera lainnya. Pada Dinas dikelompokan menjadi *operating core*, dilakukan penghapusan jabatan wakil kepala dinas dalam rangka mempendek proses birokrasi serta menghindari duplikasi tugas kepala dan wakil kepala sehingga pelaksanaan tugasnya lebih

efektif. Dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) bersifat bisa ke sekretariat, akan tetapi tidak seluruhnya berada disana.

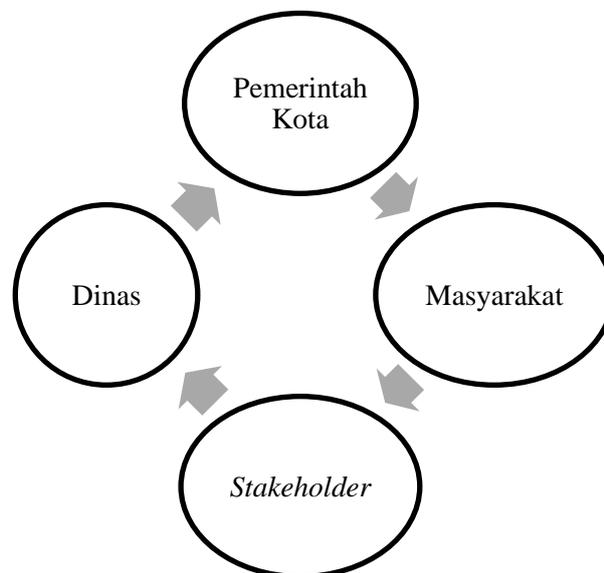
Menurut Logemann mengatakan hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa jabatan dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Dalam hal ini intinya dari hubungan kedinasan publik ini adalah kewajiban untuk pegawai dan yang bersangkutan untuk tidak menolak dalam pengangkatan dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan dimana sebaliknya juga pemerintah berhak mengangkat suatu jabatan seorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian dari yang bersangkutan (Nurmalita, 2021).

Penanganan banjir di Kota Tasikmalaya dirasa sulit untuk mencapai titik maksimal dikarenakan ada batasan dalam kewenangan yang didapat oleh BPBD Kota Tasikmalaya dan anggaran masih terbatas. Hal ini menjadikan diperlukannya *Collaborative Governance* untuk bersama-sama menangani banjir di Kota Tasikmalaya. Menurut Dadang Romdon, S.T. selaku BPBD Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan banjir telah dilaksanakannya *collaborative governance* dengan Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup.

*Collaborative governance* diperlukan dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya. Adapun definisi dari *collaborative governance* menurut Ansell and Gash merupakan upaya pemerintah yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan dengan berorientasi pada musyawarah dan konsensus bersama saat proses pengambilan keputusan kolektif. Tujuan dari

*collaborative governance* adalah untuk melaksanakan dan atau memuat program-program publik dan kebijakan publik. Konsep dari *collaborative governance* memiliki keterkaitan dengan keikutsertaan dari beberapa lembaga yang bekerja sama dalam merealisasikan tujuan, perubahan yang ingin dibuat, hasil yang ingin dicapai, dan sebagainya. Adapun bentuk dari *collaborative governance* Kota Tasikmalaya dalam penanganan Banjir pada gambar 1.3.

**Gambar 1.3**  
***Collaborative Governance Kota Tasikmalaya***



*Sumber: data olahan penulis*

Pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan dari banjir di Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakannya kerja sama dari Dinas BPBD dengan beberapa dinas lain dengan tujuan agar banjir di Kota Tasikmalaya dapat diminimalisir kerusakan dari dampak yang dihasilkan oleh bencana banjir dan bahkan dapat dicegah sebelumnya. Sebab, sesuai dengan yang disebutkan oleh Erik Yowanda selaku Sub Koordinator BPBD Kota Tasikmalaya yang menyatakan apabila cuaca saat ini bisa disebut ekstrem.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang mirip yakni, penelitian yang berjudul Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang tahun 2021 yang ditulis oleh Bima Ade Prayoga Setiawan dkk, Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan tahun 2023 yang ditulis oleh Alyaa Larasati Hasnaa dan Awang Darumurtib, dan penelitian dengan judul Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Banda tahun 2023 Aceh Aira Riskal dkk. Menyimpulkan bentuk kolaborasi pemerintahan terjadi adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan banjir di tiap-tiap kota dan kabupaten, kolaborasi yang terjalin memang membentuk hubungan yang baik dan mempermudah dalam penanggulangan banjir. Dinamika yang terjadi memang berbeda-beda namun ada satu hal yang jadi bahan pembahasan bagaimana efektifitas setelah adanya kolaborasi baik karena adanya wadah, regulasi, dan sumber daya manusia menjadi satu hal faktor dalam modal kolaborasi bagi para pemangku kepentingan.

Bagi peneliti, penelitian ini meneliti tentang banjir yang merupakan suatu hal yang dasar karena mengingat bahwa permasalahan lingkungan itu tidak akan ada habisnya dan akan terus permanen, mengingat bahwa dunia dan lingkungan akan terus berubah-ubah oleh karena itu peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk merealisasikan tugas dan kewajibannya. Selain itu, untuk menangani bencana banjir di Kota Tasikmalaya diperlukan *collaborative governance* antara beberapa instansi yang terlibat dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu bahwa penelitian ini difokuskan untuk meneliti bagaimana *collaborative*

*governance* antar beberapa instansi dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansel and Gash.

Menurut Ansel dan Gash dalam Noor (2022:40), *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana proses pelaksanaan *collaborative governance* Kota Tasikmalaya dalam penanggulangan banjir?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance* Kota Tasikmalaya dalam penanggulangan banjir?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memahami rumusan masalah diatas dari tujuan penelitian ini maka rumusan masalahnya ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* Kota Tasikmalaya dalam penanggulangan Banjir.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam *collaborative governance* Kota Tasikmalaya dalam penanggulangan Banjir

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, bahwa terdapat manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan untuk dijadikan sebagai pengetahuan dan wawasan serta dapat memberi manfaat guna menambah ilmu tentang *Collaborative Governance* Kota Tasikmalaya dalam menangani permasalahan banjir, dan dijadikan sebuah referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lainnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah penelitian ini dapat juga digunakan sebagai salah satu bahan informasi masukan serta pertimbangan dalam *Collaborative Governance* Kota Tasikmalaya dalam menangani permasalahan banjir. Dengan demikian diharapkan peneliti ini mampu melengkapi implementasi penanganan banjir di Kota Tasikmalaya.

Bagi akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai *Collaborative Governance* Kota Tasikmalaya dalam menangani permasalahan banjir Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran ilmiah dan realistik

sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan dan informasi mengenai Collaborative Governance dalam menangani permasalahan banjir di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan dorongan bagi masyarakat dalam mencegah banjir dan merawat lingkungan.